



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

**PANDANGAN AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN/PEMBICARAAN TINGKAT I
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI**

KAMIS, 7 JULI 2022

Pimpinan dan Para Anggota DPR RI yang terhormat,

Puji syukur kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Undang-undang Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan pengejawantahan dari visi nasional dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Layanan psikologi berperan penting menjaga kesehatan mental individu merupakan modal untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan produktif. Layanan psikologi yang profesional juga esensial untuk mengenali dan mengembangkan minat dan bakat generasi muda, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi dan kontribusinya bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan layanan psikologi yang profesional, kita membutuhkan pendidikan psikologi yang berkualitas; serta pengelolaan layanan psikologi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada klien maupun profesi psikologi.

Semua itu telah diatur dengan baik dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Selama proses penyusunan RUU, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan dukungan kepada Panja dari Komisi X DPR RI dan melakukan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia. Selain itu, RUU tersebut juga telah dibahas bersama sejumlah organisasi profesi Psikolog dan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Psikologi.

Selama proses penyusunan dan pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dengan melibatkan berbagai unsur strategis tersebut, kita telah menyepakati isu-isu yang krusial antara lain:

1. Perubahan cakupan RUU dari semula hendak mengatur praktik psikologi saja, menjadi RUU yang mencakup pendidikan dan layanan psikologi. Dengan demikian, RUU ini menjadi payung hukum yang lebih komprehensif serta mampu menyelaraskan proses pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog;
2. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi memberikan peran yang seimbang dan saling melengkapi antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi, organisasi-organisasi profesi, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam perwujudan layanan psikologi yang berkualitas dan merata;
3. Penyelarasan antara RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dengan Undang-Undang Kesehatan yang telah terlebih dahulu mengatur praktik psikologi di layanan fasilitas kesehatan; dan
4. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi memberikan perlindungan hak dan kewajiban yang lebih kuat pada masyarakat dalam mengakses layanan psikologi, dan bagi psikolog dalam memberikan layanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas nama pemerintah saya menyetujui dan mendukung pengesahan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Sebagai langkah tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi di dalam pemerintah untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang ini. Pemerintah akan mengajak para pemangku kepentingan, terutama organisasi-organisasi profesi dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi untuk menyusun peraturan turunan dan mengimplementasikannya dengan seoptimal mungkin.

Untuk kerja sama dalam menyelesaikan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, **atas nama Pemerintah**, kami menyampaikan terima kasih, kepada:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI
2. Pimpinan dan anggota Panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
3. Unsur Pemerintah yang terlibat:
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Sosial, dan
 - jajaran Kemendikbudristek
4. Sekretariat Komisi X DPR RI
5. Para pakar, akademisi, dan praktisi yang menjadi tenaga ahli Panja RUU ini,

6. Organisasi profesi psikologi, asosiasi penyelenggara pendidikan psikologi, serta seluruh pihak yang terlibat dan mendukung pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Semoga gotong royong kita dalam memajukan dunia pendidikan dan layanan psikologi diridhoi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Mari pimpin pemulihan, bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Om shanti, shanti, shanti, om

Namo buddhaya

Jakarta, 7 Juli 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim
Nadiem Anwar Makarim